

KERJASAMA PEMERINTAH KOTA BANDUNG DAN PT.TELKOM DALAM MEMBANGUN
PROGRAM BANDUNG SMART CITY 2013-2014

Yuditia Bahrutsawab
14010112140074

ABSTRACT

This Reasearch discusses about how the realization of partnership that held by the City Government of Bandung and PT Telkom to build the Smart City program and any program as result from the partnership. This partnership is carried out by the Government of Bandung as a government effort to implement the principles of good governance at the local level by involving the business sector in regional development. The results showed that PT.Telkom is the one who takes a lead in the creation of programs of Smart City because of the resources they have are the most widely used than resources owned by the Government of Bandung. In regards to a form of partnership that was used is Build Operation and Transfer in the sense that PT.Telkom responsible for building facilities and infrastructures needed after creating such facilities operated and given ownership to the government as a grant, PT.Telkom was using CSR money to funded it. At the level of program implementation involves many government agencies in accordance with the program generated and therefore needs a decent supervision of the main actors of the partnership. in fact the Government of Bandung surveillance mechanism is so weak that the risk of poor performance of the program is still very possible. However this partnership has resulted programs of innovative public services as a support service improvements. It is expected that the government could improve the oversight function so that the continuity of the program can be guaranteed.

Keywords: *Partnership, Smart city, Public service*

I. PENDAHULUAN

Pasca reformasi tahun 1998 Indonesia memasuki era baru dari sentralistik menjadi desentralistik atau biasa disebut dengan era otonom. Pemerintah yang desentralistik menerapkan azas demokrasi yang diikuti dengan pemberian otonomi daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Lahirnya otonomi daerah sejak 2001 tersebut telah memberikan kewenangan kepada daerah-daerah otonom kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan undang-undang¹ yang diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014.

Pemberian wewenang tersebut memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya, salah satunya dengan mengadakan perjanjian kerjasama. Dalam Pasal 363 UU nomor 23 tahun 2014 kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelayanan publik yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas. Kerjasama tersebut dapat melibatkan

pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya ataupun pemerintah daerah dengan pihak swasta. Berkaitan dengan tata cara kerjasama antar daerah, pemerintah mengeluarkan PP nomor 50 tahun 2007 mengenai tata cara kerjasama daerah, dalam PP tersebut disebutkan bahwa pihak yang menjadi subyek kerjasama adalah gubernur, bupati, walikota, dan pihak ketiga.

Kerjasama antar pemerintah daerah telah banyak diterapkan di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga banyak memiliki pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah yang diberi hak otonom mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat. Bidang infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa, terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi diantara kelompok masyarakat, serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah.

Kota Bandung adalah salah satu kota yang banyak menjalin kerjasama, baik itu dengan pemerintah daerah lainnya ataupun dengan pihak swasta, mengingat Kota Bandung mempunyai banyak potensi yang belum tergali sehingga untuk memaksimalkan potensi tersebut seringkali melibatkan pihak swasta. Terpilihnya Ridwan Kamil pada

¹Dwiyanto Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, hal 27.

tahun 2013 sebagai Walikota Bandung yang baru memberikan banyak perubahan untuk Kota Bandung.

Bandung merupakan salah satu kota yang direncanakan untuk menjadi lokasi pengembangan dan penerapan inovasi smart city, dengan nama proyek Bandung Smart city . Pemerintah kota Bandung dalam hal ini bekerjasama dengan PT.Telkom. PT Telkom yaitu salah satu perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi. Dalam kerjasama ini, PT Telkom menggunakan dana CSR-nya (corporate social responsibility) untuk membantu Kota Bandung dalam merealisasikan Bandung smart city.

Dari uraian di atas kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan PT Telkom dirasa akan mendatangkan banyak kemajuan dan keuntungan bagi kedua belah pihak, untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dan PT.Telkom sebagai upaya untuk menciptakan Bandung Kota Cerdas, maka dari itu penulis mengambil judul: Kerjasama Pemkot Bandung dan PT.Telkom dalam membangun Program Bandung Smart City.

II. PEMBAHASAN

2.1 Program-program yang dihasilkan

Pertama, Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu yang disediakan oleh pemerintah Kota Bandung adalah sebuah program yang dihasilkan oleh dinas

kesehatan dan PT.Telkom sebagai tindak lanjut dari ditandatanganinya MOU kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Bandung yang di wakili oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Program tersebut mulai dapat terlaksana pada awal tahun 2014.

Sistem penanganan gawat darurat ini adalah salah satu bentuk dari “efisiensi” dalam konsep Smart City dimana masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan secara cepat ketika dalam situasi darurat selain itu masyarakat dapat mendapatkan informasi berkaitan dengan ketersediaan ruangan di setiap rumah sakit di Kota Bandung juga informasi-informasi kesehatan dengan cara menelpon nomor 119.

Pada program SPGDT ini di tahun pertama kerjasama yaitu antara rentan waktu tahun 2013 – 2014 PT.Telkom memberikan secara hibah perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk keberlangsungan program seperti perangkat komputer, aplikasi dan memberikan akses gratis untuk pemakaian server, juga sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk mengoperasikan aplikasi serta menjadi operator call centre. Di tahun ini Dinas Kesehatan hanya tinggal memanfaatkan fasilitas tersebut dan memperbanyak kerjasama dengan rumah sakit- rumah sakit yang berlokasi di Kota Bandung untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kedua, Program E-Kelurahan adalah program yang dihasilkan dari kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung melalui Bagian Pemerintahan Umum dan PT.Telkom, melalui program

ini Pemerintah Kota Bandung menciptakan aplikasi berbasis website dimana masyarakat dapat mendapatkan pelayanan berkas-berkas dengan online, latar belakang terciptanya program e-kelurahan adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan tanpa ada batasan waktu.

Ketiga, pengadaan wifi gratis. Konsep Smart City yang dicanangkan oleh Wali Kota Ridwan Kamil adalah konsep Smart City yang mengedepankan penggunaan teknologi informasi, salah satu pilar dari Smart City tersebut adalah koneksi, artinya pemerintah harus dapat memfasilitasi teknologi informasi bagi masyarakat.

Kerjasama Pemerintah Kota Bandung dan PT.Telkom banyak menghasilkan aplikasi-aplikasi untuk smartphone ataupun komputer yang membutuhkan koneksi internet, maka dari itu Pemerintah Kota Bandung berusaha untuk menyediakan akses internet gratis di berbagai tempat publik tujuannya supaya masyarakat dapat meramaikan tempat-tempat publik tersebut seperti taman-taman kota dan tempat ibadah. Pada awal tahun 2014 Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung menindak lanjuti kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh Wali Kota dengan PT.Telkom, ditahun ini PT.Telkom memberikan perangkat-perangkat wifi gratis sebatas di taman-taman yang telah ditunjuk oleh Wali Kota.

Keempat, pembuatan aplikasi *panic button* Salah satu persyaratan dari paradigma Good Governance adalah pemerintah harus bisa melakukan pelayanan yang responsif, untuk itu

menciptakan pelayanan yang responsif dan cepat tanggap dalam hal berkaitan dengan keselamatan masyarakat Bandung maka Pemerintah Kota Bandung dan PT.Telkom menciptakan sebuah aplikasi smartphone berbasis internet.

Aplikasi ini dapat didownload secara gratis oleh masyarakat Bandung, pengguna hanya perlu mendaftarkan biodata pada menu sign up dalam aplikasi tersebut lalu menyalakan fungsi lokasi sehingga Pemerintah Kota Bandung dapat menemukan lokasi kita berada melalui Bandung Command Centre, Bandung Command Centre adalah suatu ruangan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk memantau Bandung melalui CCTV dan juga tersedia operator untuk menanggapi panggilan masyarakat melalui aplikasi *panic button* tersebut. Aplikasi ini dapat digunakan untuk semua masyarakat yang ada di wilayah Kota Bandung apabila terjadi keadaan darurat seperti pencurian, perampokan dan tindak kejahatan lainnya, dengan menggunakan aplikasi ini dari pihak pemerintah akan memberikan lokasi pengguna kepada aparaturnya yang sedang berpatroli.

2.2 Analisis Kerjasama

Seiring dengan reformasi sistem pemerintahan ke arah yang lebih demokratis yaitu dengan digalakkannya otonomi daerah maka paradigma tata kelola pemerintahanpun menjadi bergeser dari *Government* menjadi

Governance, konsep Government berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam mencapai tujuan-tujuan negara namun konsep good governance bermakna bagaimana suatu negara atau pemerintahan dapat memfungsikan unsur-unsur diluar pemerintahan untuk bersama-sama mencapai tujuan-tujuan sosial.

Unsur-unsur diluar pemerintahan yang menjadi pilar dalam paradigma good governance adalah sektor bisnis dan masyarakat, konsep good governance inilah yang mencoba untuk diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandung pada tingkat lokal dalam Program Bandung Smart City. Pemerintah Kota Bandung melibatkan sektor bisnis yaitu PT.Telkom, dalam hal pelibatan PT.Telkom dalam program Bandung Smart City ini Pemerintah Kota Bandung tidak lagi sebagai aktor tunggal dalam pelaksanaannya perumusan dan pelaksanaan program pemerintah, program ini menjadi tindakan kolektif yang dikerjakan berbarengan satu sama lain.

Pemerintah Kota Bandung dalam rangka untuk memenuhi tugas otonomi daerah maka Wali Kota Ridwan Kamil mencanangkan program Bandung Smart City, adapun tugas otonomi daerah itu ialah:

1. Pemerintah daerah yang efektif dan efisien

Dalam rangka untuk menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, akuntabel dan

menciptakan penghematan dalam setiap kegiatan pemerintahan, dengan konsep Smart City yaitu dengan cara penggunaan teknologi dalam urusan pemerintahan permasalahan birokrasi yang lambat dapat teratasi karena semua data yang diperlukan untuk bekerja sudah terintegrasi pada masing-masing perangkat komputer yang dimiliki setiap bagian pemerintahan.

2. Pembangunan daerah yang merata

Salah satu kelebihan dari teknologi adalah dapat menembus hambatan geografis, di era teknologi seperti sekarang pembangunan daerah tidak hanya terbatas pada sesuatu yang berbentuk fisik tapi juga non-fisik. Pemerataan pembangunan daerah dengan penggunaan teknologi dapat mensiasati masalah ketidakmerataan sumberdaya, sebagai contoh dalam kasus kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dan PT.Telkom dalam membangun fasilitas pelayanan kesehatan maka diciptakanlah Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu, dengan sistem ini Pemerintah tidak harus menyiapkan mobil ambulance di setiap wilayah dan seluruh masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada diskriminasi.

3. Memberikan pelayanan publik yang tepat, cepat, murah dan bermutu

Masyarakat kota yang modern menuntut sistem pelayanan publik yang serba efisien, program Smart City dalam pelayanan publik adalah

solusi bagi efisiensi pelayanan seperti dalam kasus pelayanan di tingkat desa Pemerintah Kota Bandung dengan bantuan PT.Telkom menciptakan e-kelurahan dimana masyarakat yang tidak mempunyai waktu untuk datang ke kantor desa dapat mendapatkan pelayanan secara elektronik tanpa ada sekat jarak dan waktu karena e-kelurahan ini dapat diakses dimana saja dalam waktu 24jam.

Dilihat dari sudut pandang pemerintah manfaat yang didapatkan diantaranya:

1. Penghematan Dana APBD

Sebagaimana telah diterangkan bahwa PT.Telkom menanggung seluruh biaya pembangunan infrastruktur program kerjasama dan Pemerintah Kota Bandung hanya membayar biaya pelayanan yang terjangkau ditahun selanjutnya, dengan demikian dana dari APBD yang seharusnya digunakan untuk membangun infratraktur pelayanan publik dapat dialihkan pada sektor yang lainnya yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Tersedianya Alternatif Sumber Pembiayaan

Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pihak swasta menjadi alternatif pembiayaan yang mudah didapatkan untuk pembangunan kota. Selama ini pemerintah daerah yang mengandalkan dana APBD saja sedangkan dana APBD itu terbatas sehingga sulit untuk menciptakan program pembangunan yang

berkelanjutan, sehingga kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dan PT.Telkom telah menjadi solusi percepatan pembangunan.

3. Kualitas Pelayanan yang Lebih Baik

Salah satu pertimbangan dilaksanakannya kerjasama tersebut adalah kekurangan sumberdaya baik sumberdaya manusia ataupun sumberdaya teknologi dan ilmu pengetahuan, dengan mengadopsi sumberdaya yang di miliki oleh PT.Telkom kerjasama ini telah menghasilkan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik. Selain itu banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai kinerja pelayanan yang terlalu birokratis menuntut pemerintah untuk mencari solusi agar pelayanan publik bisa di lakukan dengan efektif dan efisien, dengan menggunakan teknologi masalah pelayanan yang lambat dapat diatasi.

4. Mengurangi Beban Kerja Pemerintah

Pelaksanaan pelayanan publik yang dibantu oleh pihak swasta adalah salah satu cara untuk mengurangi beban kerja pemerintah, dengan demikian tugas pemerintah hanya tinggal mengawasi berjalannya proses pelayanan publik dalam beberapa kasus kerjasama yang dilakukan oleh beberapa SKPD dalam kerjasama program Smart City ini PT.Telkom dalam tataran teknis adalah pihak yang menjalankan pelayanan sehingga pemerintah hanya tinggal mengawasi saja.

Berkaitan dengan manfaat yang didapatkan oleh PT.Telkom berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan dengan adanya kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung ini yang pertama adalah promosi, promosi ini maksudnya dengan bermitra dengan pemerintah PT.Telkom dapat mendapatkan peningkatan pemasukan dari penggunaan internet masyarakat, sebagai contoh pada program wifi gratis yang telkom sediakan untuk area-area publik. PT.Telkom bisa mendapatkan kenaikan pendapatan dari akses internet yang berbayar seiring dengan lebih populernya akses wifi tersebut dikalangan masyarakat. Promosi yang didapatkan oleh Telkom ini ternyata tidak terbatas hanya pada promosi kepada masyarakat saja namun untuk instansi-instansi negara lainnya diluar pemerintah.

Banyaknya permasalahan yang dikerjasama dengan Telkom secara otomatis dapat memperluas pasar Telkom juga, pada contoh kasus di atas instansi-instansi negara lainnya membeli jenis teknologi yang sama untuk keperluan mereka masing-masing. Kedua, Kepercayaan dari pemerintah, seiring dengan banyaknya aspek-aspek yang dikerjasamakan oleh Pemerintah dengan PT.Telkom akan terlihat kinerja dan komitmen yang baik dari PT.Telkom hal ini akan menimbulkan kepercayaan kepercayaan yang berkepanjangan kepada PT.Telkom sehingga sangat dimungkinkan kerjasama-kerjasama di masa depan akan terwujud. Selain itu kepercayaan ini juga sangat bermanfaat bagi PT.Telkom karena dimata

pemerintah PT.Telkom mempunyai keistimewaan (privileges) sehingga bisa memperlancar program-program telkom kedepannya di wilayah Kota Bandung.

Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam kerjasama membangun program Smart City tersebut, kendala-kendala tersebut diantaranya :

1. Sumberdaya Manusia

Smart City adalah sebuah konsep kota yang banyak melibatkan penggunaan teknologi didalamnya, namun ketersediaan sumberdaya manusia didalamnya tetap dibutuhkan untuk mengoperasikan teknologi pelayanan tersebut. Salah satu yang menjadi kendala yang timbul dari sumberdaya manusia itu antara lain :

a. Paradigma Lama yang masih Melekat

Paradigma lama yang dimaksud adalah masih banyak aparat pemerintahan yang masih berpikiran tradisional dalam melaksanakan pelayanan publik, mereka beranggapan bahwa selama pelayanan tersebut dapat dilaksanakan secara manual tanpa menggunakan teknologi mereka lebih memilih cara lama untuk melaksanakannya sebagaimana terjadi dalam program e-kelurahan.

Menurut hemat peneliti, paradigma lama ini masih melekat karena kekurangan kesadaran (Lack of awareness) akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip smart city itu sendiri juga disertai oleh ketidak mampuan aparatatur pemerintah itu sendiri itu mengoperasikan perangkat-perangkat teknologi terkini sehingga mereka merasa keberatan untuk terus update dengan

perkembangan dunia teknologi, hal ini jelas menghambat efektifitas pelayanan dan penerapan program Smart City karena pemerintah membutuhkan lebih banyak waktu untuk melatih dan merubah pola pikir lama para aparatur pemerintahan yang seperti ini.

b. Jumlah Sumberdaya

Masalah lain yang timbul dari sumberdaya manusia itu diantaranya adalah kekurangan jumlah sumberdaya, hal ini terjadi dalam Program Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu kekurangan jumlah tenaga medis menyebabkan tidak semua panggilan darurat dari masyarakat dapat ditangani atau setidaknya tidak dapat ditangani dengan cepat.

2. Koordinasi

Koordinasi adalah salah satu hal yang penting dalam suatu kerjasama, koordinasi yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula dan sesuai dengan harapan setiap pihak yang terlibat. Dalam alur kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dan PT.Telkom setidaknya terdapat tiga instansi yang terlibat dalam suatu kerjasama yaitu Bagian Kerjasama sebagai leading sector dari Tim Koordinasi Kerjasama Satuan Daerah (TKKSD), Satuan Kerja Pembantu Daerah (SKPD) yang terkait dan PT.Telkom.

Dalam tataran teknis pelaksanaan koordinasi antara SKPD dan PT.Telkom sudah berjalan dengan baik dan dinamis namun permasalahannya koordinasi ini tidak terjalin antara SKPD dengan bagian kerjasama, sebagaimana telah disebutkan bahwa bagian kerjasama

memiliki fungsi untuk pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama namun tidak semua SKPD yang menjalin kerjasama berusaha untuk menyampaikan laporan kepada bagian kerjasama secara berkala. Dari beberapa SKPD yang menjalin kerjasama hanya Dinas Kesehatan yang melakukan koordinasi dengan Bagian Kerjasama. Koordinas yang berkala ini berfungsi agar Bagian Kerjasama dapat mengawasi jalannya kerjasama secara berkala juga karena bisa jadi tanpa monitoring kerjasama tersebut tidak berjalan.

3. Penyalahgunaan Fasilitas Layanan oleh Masyarakat

Salah satu kelebihan dari penggunaan teknologi dalam pelayanan publik adalah masyarakat tidak harus bertatap muka langsung dengan pejabat publik, dengan komunikasi jarak jauh kebutuhan masyarakat dapat tersampaikan, namun hal ini juga yang menimbulkan masalah tersendiri yaitu banyaknya masyarakat yang iseng menggunakan layanan padahal tidak membutuhkan atau memberikan laporan palsu. Hal ini menyebabkan orang-orang yang benar-benar membutuhkan layanan menjadi tertunda pelayanannya.

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam pembahasan Kerjasama Pemerintah Kota Bandung dan

PT.Telkom telah menghasilkan beberapa program yaitu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu, E-kelurahan, wifi gratis dan aplikasi Pannic Button. Pembangunan program Bandung Smart City adalah sebagai bentuk usaha Pemerintah Kota Bandung untuk memenuhi tanggungjawab otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip good governance bentuk dari kepedulian PT.Telkom untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota Bandung akan pelayanan publik yang lebih baik, efektif dan efisien dengan penggunaan teknologi.

Kerjasama ini dilakukan sebagai solusi dari kekurangan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung dan keterbatasan dana APBD untuk pembangunan infrastruktur pelayanan yang memadai. PT.Telkom mendanai

kerjasama ini menggunakan dana hibah CSR untuk membangun sarana dan prasana program-program Smart City sehingga beban APBD Kota Bandung dapat diminimalisir dan kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih baik dapat terpenuhi dengan cepat.

Hasil dari kerjasama ini terbukti telah menghasilkan program-program yang berkelanjutan, perbaikan pelayanan serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi kualitas pelayanan. PT.Telkom selaku pihak yang menciptakan aplikasi-aplikasi pelayanan senantiasa siaga untuk menerima keluhan apabila ada permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi sehingga selama program-program tersebut diawasi dengan baik oleh pemerintah PT.Telkom akan memperbaikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Ahmad Nurman, *Manajemen Perkotaan*, Jakarta: Tatamedia, 2013
- Dwiyanto Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Goss, Sue, *Making Local Governance Work: Network, Relationship, and The Management of Change*. New York. Pargrave
- Ibrahim Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung. Mandar Maju
- Ikbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, 2002
- Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta, 2009
- Joko Widodo, 2001, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Insan Cendikia, Surabaya, 2001
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Kosda Karya, Bandung, 1998
- M. jafar hafsan, 2003, *Kemitraan*, Jakarta: PT. Surya Multi Grafika
- Nasir Moh, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Pamudji. 1985. *Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah*. Jakarta. PT. Bina Aksara
- Patton Q. Michael, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Petters, b. Guy. 1998. *Managing Horizontal Government: the Politic of Coordination*. Canada Canadian Centre For Management Development
- Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada. 2004. *Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah*, Yogyakarta.
- Ratminto dan Atik Septi W, 2005, *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media. Yogyakarta.

Suharto, Edi (2010), Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Indonesia, Bandung: Alfabeta

Syarifin, pipin dan Dedah Jubaedah. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bandung, Puastaka Setia, 2005